

ANALISIS PENGARUH REALISASI PENDAPATAN NEGARA, PENGELUARAN PEMERINTAH, DAN ZAKAT TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI INDONESIA DITINJAU DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (2001-2024)

Oleh:

Reyhan Aulia¹

Ruslan Abdul Ghofur²

Yulistia Devi³

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Alamat: Jl. Letnan Kolonel H Jl. Endro Suratmin, Sukarame, Kec. Sukarame,

Kota Bandar Lampung, Lampung (35131).

Korespondensi Penulis: auliareyhan141@gmail.com,

ruslanabdulghofur@radenintan.ac.id, yulistiadevi@radenintan.ac.id.

Abstract. Poverty has become a significant problem, which can cause problems in economic stability and social development. Although state revenue and government spending continue to increase every year, the poverty rate in Indonesia has not shown a significant decline from year to year. On the other hand, the enormous potential of zakat has not been fully optimized as an instrument for poverty alleviation. This phenomenon raises important questions that have not been widely researched. Therefore, this study was conducted to analyze the effect of state revenue, government expenditure, and zakat on poverty levels in Indonesia. This study uses a quantitative approach with multiple linear regression analysis. The testing was conducted using a multiple regression model, namely normality, multicollinearity, heteroscedasticity, normality, T-test, F-test, and R² test. The type of data used was secondary data taken from the Indonesian Central Statistics Agency (BPS) and the National Zakat Agency (BAZNAS). The data includes state revenue, government expenditure, zakat, and poverty levels in Indonesia from 2001 to 2024. The results of the study explain that state revenue has a significant negative effect

ANALISIS PENGARUH REALISASI PENDAPATAN NEGARA, PENGELUARAN PEMERINTAH, DAN ZAKAT TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI INDONESIA DITINJAU DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (2001-2024)

on poverty levels, while government expenditure has a significant positive effect on poverty levels. Zakat shows an insignificant negative effect on poverty levels. From an Islamic economic perspective, this study emphasizes the importance of prudent and Sharia-based poverty alleviation, which avoids usury and ensures that funds are used for sustainable development. Overall, this study concludes that poverty rates take into account macroeconomic factors and broader economic conditions, as well as the application of Islamic economic principles to achieve sustainability and justice.

Keywords: State Revenue, Government Expenditure, Zakat And Poverty Levels, Islamic Economics.

Abstrak. Kemiskinan telah menjadi permasalahan penting menjadi, yang dapat menyebabkan permasalahan dalam stabilitas ekonomi dan perkembangan sosial. Meskipun pendapatan negara dan pengeluaran pemerintah terus meningkat disetiap tahun, tingkat kemiskinan di Indonesia masi belum memperlihatkan penurunan yang signifikan dari tahun ketahun. Di sisi lain, potensi zakat yang besar belum sepenuhnya bias mengoptimalkan sebagai instrumen pengentasan kemiskinan. Fenomena ini memberikan pertanyaan penting yang belum banyak diteliti. Sehingga Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis apa pengaruh pendapatan negara, pengeluaran pemerintah, dan zakat berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis regresi linier berganda. Pengujian dilakukan menggunakan model regresi berganda yaitu uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, normalitas, uji T, uji f, dan uji R^2 . Jenis data yang digunakan merupakan data sekunder yang diambil dari Badan Pusat Statistika (BPS) Indonesia, dan badan amil zakat(BAZNAS). Data meliputi pendapatan negara, pengeluaran pemerintah, zakat, dan tingkat Kemiskinan di Indonesia dari tahun 2001-2024. Hasil penelitian memberikan penjelasan bahwa pendapatan negara memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap tingkat kemiskinan, sedangkan pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh positif signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Zakat menunjukkan pengaruh negatif tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Dalam perspektif ekonomi Islam, menggaris bawahi pentingnya pemberdayaan tingkat kemiskisan yang bijaksana dan berbasis syariah, yang menghindari terkadinya riba dan

memastikan bahwa dapat digunakan untuk pembangunan yang berkelanjutan. Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa tingkat kemiskinan mempertimbangkan faktor makro ekonomi dan kondisi ekonomi yang lebih luas, serta penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam untuk mencapai keberlanjutan dan keadilan.

Kata Kunci: Pendapatan Negara, Pengeluaran Pemerintah, Zakat dan Tingkat Kemiskinan, Ekonomi Islam.

LATAR BELAKANG

Kemiskinan merupakan masalah ekonomi dan sosial yang kompleks serta menjadi tantangan besar bagi negara berkembang, termasuk Indonesia. Meskipun berbagai program pembangunan telah dilaksanakan, kemiskinan tetap mencerminkan ketimpangan distribusi pendapatan dan kesejahteraan. Di Indonesia, kemiskinan telah menjadi masalah yang berlangsung sejak lama dan terus menjadi hambatan besar bagi pembangunan ekonomi, persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan dihitung berdasarkan pendapatan yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, dan layanan lainnya. Untuk menanggulangi kemiskinan, pemerintah bersama berbagai pihak telah menerapkan sejumlah kebijakan dan program, seperti optimalisasi pendapatan negara, pengeluaran pemerintah, dan pemanfaatan dana zakat.(Jufri Jacob et al., 2024)

Pendapatan negara merupakan hak pemerintah yang menambah kekayaan nasional melalui berbagai transaksi, dan menjadi dasar penting dalam menganalisis kondisi ekonomi. Namun, penyediaan layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan masih belum merata, terutama di wilayah miskin. Ketergantungan pendapatan negara pada pajak dan sumber daya alam juga membuat ruang fiskal untuk pengeluaran sosial menjadi terbatas dan rentan terhadap fluktuasi ekonomi global. Kondisi ini membatasi kemampuan pemerintah dalam mengurangi kemiskinan secara signifikan. Ketika terjadi ketimpangan pendapatan, distribusi pendapatan antarindividu, sektor, maupun wilayah menjadi semakin rendah. Kemiskinan juga dipengaruhi oleh ketidaksetaraan sosial, kebijakan pemerintah, dan peluang ekonomi.(Akhmad & Barabasi, 2025)

Pengeluaran pemerintah berperan penting dalam menciptakan lapangan kerja serta menurunkan kemiskinan. Meskipun belanja sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), terus meningkat, penyalurannya masih belum efektif akibat hambatan

ANALISIS PENGARUH REALISASI PENDAPATAN NEGARA, PENGELUARAN PEMERINTAH, DAN ZAKAT TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI INDONESIA DITINJAU DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (2001-2024)

birokrasi, korupsi, dan kurangnya efisiensi. Kesalahan sasaran (inclusion dan exclusion errors) juga mengurangi dampak program terhadap penurunan kemiskinan. Yang dimana kepemilikan harta itu harus dibagikan secara merata dan adil, pengeluaran pemerintah bias dijadikan acuan pengatur pasar atau pendistribusian kekayaan yang nyata dan merata ada tidak terjadi pemicu ketimpangan yang dapat menyebabkan tingkat kemiskinan semakin meningkat.(Putri & Putri, 2021)

Zakat semakin mendapat perhatian sebagai instrumen pengentasan kemiskinan dalam perspektif ekonomi Islam. Menurut Siddiqi, zakat merupakan instrumen redistribusi yang berperan dalam mewujudkan keadilan sosial. Potensi zakat Indonesia diperkirakan mencapai Rp200 triliun per tahun, tetapi realisasi pengumpulan baru sekitar Rp12–15 triliun. Zakat dapat menjadi sumber pendanaan sosial alternatif, namun pengelolaannya masih terfragmentasi sehingga kontribusinya belum optimal. Belum adanya integrasi yang kuat antara zakat dan kebijakan fiskal membuat perannya dalam mengurangi kemiskinan masih terbatas. Ketimpangan antara potensi dan realisasi zakat menunjukkan bahwa tata kelolanya masih perlu diperbaiki.(Syakur & Kholik, 2019).

KAJIAN TEORITIS

Teori Kemiskinan dalam Ekonomi Islam (Islamic Poverty Theory) Menurut M. Umer Chapra kemiskinan dalam perspektif ekonomi Islam merupakan kondisi multidimensi yang tidak hanya berkaitan dengan kurangnya pendapatan, tetapi juga ketidakadilan dalam distribusi kekayaan, lemahnya kebijakan fiskal, serta tidak berfungsinya instrumen-instrumen sosial syariah seperti zakat, infak, dan wakaf. M. Umer Chapra menegaskan dalam buku *Islam and Economic Challenge* (1992) bahwa dalam ekonomi Islam, kemiskinan bukan sekadar fenomena ekonomi, tetapi juga persoalan moral, sosial, dan struktural yang muncul akibat penyimpangan dari prinsip keadilan (al-‘adl), keseimbangan (tawāzun), dan amanah dalam pengelolaan sumber daya publik.(Yusuf, 2022)

Teori Fiskal Islam (Islamic Fiscal Theory) Teori ini dikemukakan M. Abdul Mannan, yang dimana pendapatan negara dalam perspektif ekonomi Islam berasal dari berbagai sumber yang sah secara syariah, seperti zakat, kharaj (pajak atas tanah), jizyah, dan hasil perdagangan atau bea masuk, yang dikelola secara adil dan amanah untuk

memenuhi kebutuhan masyarakat serta menjaga kesejahteraan umat. Mannan menekankan bahwa kepemilikan harta bersifat relatif; harta bukan milik mutlak individu, melainkan amanah dari Allah yang harus digunakan sesuai prinsip keadilan (al-‘adl) dan keseimbangan (tawāzun).(Khilmia & Rahmawati, n.d.)

Teori Keuangan Publik Islam (Islamic Public Finance Theory) Menurut M. Abdul Mannan dalam buku *Islamic Economics: Theory and Practice* pengeluaran pemerintah dalam ekonomi Islam merupakan instrumen penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga stabilitas ekonomi sesuai prinsip keadilan distributif. Ia menegaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk mengalokasikan pengeluaran secara efisien dan tepat sasaran terhadap sektor-sektor yang memberikan kemaslahatan publik (al-maslahah al-‘ammah), seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan perlindungan sosial. (Mannan, 2022)

Teori Distribusi dan Keadilan Sosial Islam Menurut M. Nejatullah Siddiqi, zakat merupakan salah satu pilar utama dalam sistem ekonomi Islam yang memiliki peran strategis dalam menciptakan distribusi kekayaan yang adil dan mengurangi kemiskinan struktural di masyarakat. Dalam buku *Muslim Economic Thinking* Siddiqi menegaskan bahwa zakat bukan hanya kewajiban ibadah, tetapi juga merupakan instrumen utama dalam kebijakan sosial-ekonomi yang dirancang untuk menjamin kesejahteraan publik. Dalam pandangan ekonomi Islam modern, Siddiqi menyatakan bahwa zakat berfungsi sebagai alat redistribusi pendapatan yang dapat mengurangi ketimpangan antara golongan kaya dan miskin melalui mekanisme pengalihan harta dari mereka yang memiliki kelebihan kepada kelompok mustahiq.(Murteza & Aziz, 2024).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menganalisis pengaruh variabel independen, yaitu adalah pendapatan negara, pengeluaran pemerintah dan zakat), terhadap variabel dependen, yaitu tingkat kemiskinan. Pendekatan kuantitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menguji hipotesis secara statistik dan memperoleh data numerik yang relevan. Populasi yang digunakan penelitian ini adalah pendapatan negara, pengeluaran pemerintah dan tingkat kemiskinan yang telah dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistika Indonesia pada tahun 2001-2024 dan zakat berasal dari data yang dipublikasikan oleh Baznas. Teknik pengambilan sampel yang digunakan penelitian ini

ANALISIS PENGARUH REALISASI PENDAPATAN NEGARA, PENGELUARAN PEMERINTAH, DAN ZAKAT TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI INDONESIA DITINJAU DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (2001-2024)

purpose sampling yang berasal dari laporan 24 tahun terakhir di Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.(Ningsih & Dukalang, 2019)

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi, yang mengumpulkan informasi dari berbagai publikasi dan dokumen yang relevan. Untuk menganalisis data digunakan regresi linier berganda dengan perangkat lunak statistik seperti Eviews. Beberapa uji statistik juga dilakukan untuk menentukan model yang tepat, Pengujian dilakukan menggunakan model regresi berganda yaitu uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, normalitas, uji T, uji f, dan uji R^2 . Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa analisis yang dilakukan akurat dan dapat diandalkan, sehingga memberikan pemahaman yang lebih baik tentang dinamika tingkat kemiskinan di Indonesia.(Padilah & Adam, 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

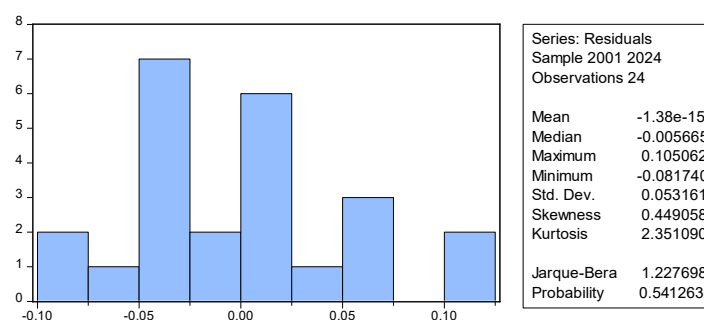
1. Hasil Uji Asumsi Klasik

a) Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah residual dalam sebuah model regresi berdistribusi normal atau tidak.Uji yang digunakan adalah uji *Jarque Bera*. Kriteria penilaian statistik JB yakni:

Probabilitas $JB > \alpha=5\%$, maka residual terdistribusi normal

Probabilitas $JB < \alpha=5\%$, maka residual tidak terdistribusi normal.



Didapatkan nilai dari *Jarque-Bera* adalah sebesar 1,227698 dengan probabilitas sebesar 0,541263. Berdasarkan kriteria penilaian statistik JB, dengan nilai probabilitas sebesar 0,541263 > dari $\alpha = 5\%$ yakni 0,05, maka dapat dikatakan residual terdistribusi normal.

b) Hasil Uji Multikolinearita

Uji multikolinieritas dilakukan untuk mengetahui adanya hubungan antara variabel-variabel bebas. Uji keberadaan multikolinieritas dilakukan dengan menggunakan metode *Variance Inflation Factor* (VIF) Hasil uji multikolinieritas disajikan dalam tabel di bawah ini

Tabel 1.2 Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Centered VIF
C	NA
LOG(PN)	1,483913
LOG(PP)	1,319620
LOG(ZP)	1,477284

Sumber:*Olah Data E-Views-10 (2025)*

Berdasarkan tabel 1.2 dapat melihat hasil uji multikolinieritas dengan menggunakan metode *Variance Inflation Factor* (VIF), diketahui bahwa perhitungan nilai VIF seluruh variabel bebas berada dibawah 10 atau kurang dari dari 10. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah multikolinearitas pada model regresi.

c) Hasil Uji Heteroskedastisitas

Penilaian satu model regresi memiliki masalah heteroskedastisitas dapat diketahui dari uji *White Heteroskedasticity*. Uji *White Heteroskedasticity* mengembangkan sebuah metode yang tidak memerlukan asumsi tentang adanya normalitas pada residual. Jika nilai chi-squares hitung ($n \cdot R^2$) lebih besar dari nilai χ^2 kritis dengan derajat kepercayaan tertentu (α) maka ada heteroskedastisitas dan sebaliknya jika chi-squares hitung lebih kecil dari nilai χ^2 kritis menunjukkan tidak adanya heteroskedastisitas.

Tabel 1.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas

F-statistic	2,684272	Prob. F(3,20)	0,0742
Obs*R-squared	6,889417	Prob. Chi-Square(3)	0,0755
Scaled explained SS	3,232021	Prob. Chi-Square(3)	0,3572

Sumber:*Olah Data E-Views-10 (2025)*

ANALISIS PENGARUH REALISASI PENDAPATAN NEGARA, PENGELUARAN PEMERINTAH, DAN ZAKAT TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI INDONESIA DITINJAU DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (2001-2024)

Berdasarkan Tabel 1.3 nilai chi square hitung ($n.R^2$) sebesar 6,889417 diperoleh dari informasi Obs*R-squared yaitu jumlah observasi yang dikalikan dengan koefisien determinasi. Sedangkan nilai chi squares tabel (χ^2) pada $\alpha = 5\%$ dengan df sebesar 4 adalah **9,48**. Karena nilai chi square hitung ($n.R^2$) sebesar 6,889417 < chi-square tabel (χ^2) sebesar **9,48**, maka tidak ditemukan gejala heteroskedastisitas pada model regresi linear berganda.

d) Hasil Uji Autokorelasi

Suatu model regresi dikatakan terkena autokorelasi, jika ditemukan adanya korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode $t - 1$ (periode sebelumnya). Autokorelasi hanya ditemukan pada regresi yang datanya time series. Untuk mengetahui ada tidaknya autokorelasi dapat dilakukan pengujian yakniuji Breusch-Godfrey Berikut hasil pengujian autokorelasi dari model regresi berganda:

Tabel 1.4 Hasil Uji Autokorelasi

F-statistic	2,080783	Prob. F(1,19)	0,1654
Obs*R-squared	2,368925	Prob. Chi-Square(1)	0,1238

Sumber: *Olah Data E-Views-10 (2025)*

Berdasarkan hasil uji autokorelasi pada tabel 1.4 diatas, didapatkan informasi besaran nilai chi-squares hitung adalah sebesar 2,368925, sedangkan nilai Chi Squares kritis pada derajat kepercayaan $\alpha = 5\%$ dengan df sebesar 3 memiliki nilai sebesar 7,81. Dari hasil tersebut, maka dengan nilai Chi Square hitung sebesar 2,368925 < dari nilai Chi Square kritis sebesar 7,81, maka hasil tersebut menunjukkan tidak terjadi masalah autokorelasi pada model.

2. Hasil Uji Hipotesis

a. Hasil Uji t (Keberartian Parsial)

Uji t digunakan untuk mencari tahu seberapa besar signifikasi variabel independen terhadap variabel dependennya secara parsial dengan cara membandingkan nilai probabilitas terhadap tingkat signifikasi (α) sebesar 5% atau 0,05. Jika probabilitasnya kurang dari 0,05 artinya setiap variabel independen yang diuji memiliki signifikasi yang berarti terima H_1 dan tolak H_0 ,

namun apabila variabel yang diuji secara parsial tidak lebih dari 0,05 artinya tidak signifikan terima H_0 dan tolak H_1 . Pengujian terhadap parameter secara parsial dilakukan dengan uji t (t-test) yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pendapatan negara pengeluaran pemerintah dan zakat tahun 2001-2024 secara parsial terhadap Tingkat Kemiskinan diIndonesia tahun 2001-2024. Hipotesis dalam uji parsial sebagai berikut:

Dengan menggunakan signifikansi 5% ($\alpha = 0,05$), dengan $df (n-k) = (24-4) = 20$, maka diperoleh t_{tabel} sebesar 1,72472 (n = jumlah observasi, k = jumlah variabel)

1) Pengujian nilai PN secara parsial terhadap Tingkat Kemiskinan (TK) adalah :

Tabel 1.5 Hasil Uji T (keberhasilan Parsial) PN

Variabel	Koefisien	t-statistik/ t-hitung	t-tabel	Probabili	Kesimpulan
PN	-0,34790	-16,83098	1,72472	0,0000	Didukung

Sumber:Olah Data E-Views-10 (2025)

Berdasarkan tabel 4.6 diatas, dapat dilihat bahwa t-hitung sebesar - 16.83098 lebih kecil daripada t-tabel sebesar 1,72472. Probabilitas (p-value) = 0.0000 < 0.05 (sangat signifikan) Artinya, variabel PN berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Koefisien bernilai (-0.34790), artinya Jadi, PN berpengaruh negatif dan signifikan terhadap variabel dependen

Kesimpulan: Didukung Variabel PN berpengaruh negatif signifikan terhadap terhadap Tingkat Kemiskinan.

2) Pengujian nilai PP secara parsial terhadap Tingkat Kemiskinan (KMS) adalah :

Tabel 1.6 Hasil Uji T (keberhasilan Parsial) PP

Variabel	Koefisie n	t-statistik/ t-hitung	t-tabel	Probabil i	Kesimpulan
PP	0.041237	2.966257	1,72472	0,0076	Didukung

Sumber:Olah Data E-Views-10 (2025)

ANALISIS PENGARUH REALISASI PENDAPATAN NEGARA, PENGELUARAN PEMERINTAH, DAN ZAKAT TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI INDONESIA DITINJAU DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (2001-2024)

Berdasarkan tabel 1.6 diatas, dapat dilihat bahwa t-hitung sebesar 2.966257 lebih besar daripada t-tabel sebesar 1,72472. Probabilitas (p-value) = $0.0076 < 0.05$ (sangat signifikan) Artinya, variabel PP berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Koefisien bernilai (2.966257), artinya pengaruhnya positif dan signifikan terhadap variabel dependen.

Kesimpulan: Didukung Variabel PP berpengaruh positif signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan.

3) Pengujian nilai ZP secara parsial terhadap Tingkat Kemiskinan (KMS) adalah :

Tabel 1.7 Hasil Uji T (keberhasilan Parsial) ZP

Variabel	Koefisien	t-statistik/ t-hitung	t-tabel	Probabili	Kesimpulan
ZP	-0.021258	-1.595353	1,72472	0.1263	Tidak Didukung

Sumber:Olah Data E-Views-10 (2025)

Berdasarkan tabel 1.7 diatas, dapat dilihat bahwa t-hitung -1.595353 sebesar lebih kecil daripada t-tabel sebesar 1,72472. Maka menerima H_a dan menolak H_0 , Probabilitas (p-value) = $0.1263 > 0.05$ (tidak signifikan) Artinya, variabel ZP berpengaruh tidak signifikan terhadap variabel dependen. Koefisien bernilai (-0.021258), artinya ZP berpengaruh negative tidak signifikan terhadap variabel dependen

Kesimpulan: Tidak didukung Variabel ZP berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan

b. Hasil Uji F (Keberhasilan Keseluruhan)

Uji analisis f-statistik untuk menguji apakah terdapat pengaruh simultan koefisien variabel regresi secara signifikan. Dapat diketahui dari tabel hasil regresi di atas bahwa nilai P value sebesar $0.000000 < \alpha$ (5%) yang berarti signifikan menolak H_0 . maka dapat diartikan bahwa variabel independen Pendapatan Negara, Pengeluaran Pemerintah dan Zakat secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen Tingkat Kemiskinan.

1) Taraf nyata:

Dengan taraf nyata (α) = 5 % atau tingkat keyakinan 95% dengan derajat kebebasan $df = (k-1 (df_1)) (n-k-1 (df_2)) = (4-1) (24-3-1) = (3) (20)$, diperoleh nilai F_{tabel} sebesar 3,493 untuk seluruh model persamaan. (k = Total Variabel, n = jumlah observasi)

2) Kriteria Pengujian

H_0 diterima jika $F_{hitung} < 3,493$

H_0 ditolak jika $F_{hitung} > 3,493$

Tabel 1.8 Hasil Uji F (keberhasilan Keseluruhan)

Variabel	f-statistik	t-tabel	Probabilitas	Kesimpulan
ZP	-1.595353	1,72472	0.1263	Tidak Didukung

Sumber: Olah Data E-Views-10 (2025)

Berdasarkan tabel 1.8 diatas dapat dilihat bahwa f-hitung sebesar 144.8081 lebih besar dari pada f tabel sebesar 3,493. dengan nilai P-value sebesar 0.000000, yang lebih kecil dari tingkat signifikansi (α) = 5 %. Hal ini Maka menerima H_a dan menolak H_0 , yang berarti bahwa variabel Pendapatan negara, pengeluaran pemerintah, zakat secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia.

c. Hasil Uji Koefisien determinasi (R^2)

Untuk mengetahui bagaimana pengaruh variabel independen Pendapatan Negara, Pengeluaran Pemerintah dan Zakat dapat menjelaskan perubahan atau variasi dari variabel dependen Tingkat Kemiskinan maka digunakan analisis koefisien determinasi (R^2).

Tabel 1.9 Hasil Uji R^2 (keberhasilan Keseluruhan)

R-squared	0.955988
Adjusted R-squared	0.949387
S.E. of regression	0.057009

ANALISIS PENGARUH REALISASI PENDAPATAN NEGARA, PENGELUARAN PEMERINTAH, DAN ZAKAT TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI INDONESIA DITINJAU DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (2001-2024)

F-statistic	144.8081
Prob(F-statistic)	0.000000

Sumber: Olah Data E-Views-10 (2025)

Nilai R^2 terletak pada $0 < R^2 < 1$, suatu nilai R^2 mendekati 1 yang artinya modelnya semakin baik. Sedangkan nilai R^2 yang bernilai nol berarti tidak ada hubungan antara variabel tak bebas dengan variabel yang menjelaskan. Dari tabel, Dengan letak $R^2 < 1$ dengan nilai $0 < 0,94 < 1$, hal ini berarti bahwa varians dari pendapatan Negara pengeluaran pemerintah dan zakat dan mampu menjelaskan *variens* dari tingkat kemiskinan sebesar 94%, sedangkan 6% sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

PEMBAHASAN

Pengaruh Pendapatan Negara Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Indonesia

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa pendapatan negara memiliki koefisien sebesar -0,347908 dan nilai probabilitas 0,0000, yang lebih kecil dari tingkat signifikansi α (5%). Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan negara berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia 2001-2024. Dengan probabilitas 0,0000 yang sangat kecil, hubungan ini signifikan secara statistik, sejalan dengan Teori Fiskal Islam (Islamic Fiscal Theory) pengelolaan pendapatan negara yang adil, penggunaan instrumen fiskal syariah, dan distribusi zakat secara produktif dapat mengurangi ketimpangan, memberi akses modal dan layanan publik kepada masyarakat miskin, serta menciptakan peluang pemberdayaan ekonomi. Penelitian yang dilakukan oleh Abdul rahman menunjukkan bahwa pendapatan negara berperan penting dalam mengukur kondisi ekonomi suatu negara dan mendukung program pengentasan kemiskinan, memberikan perspektif bahwa peningkatan pendapatan negara dapat mengurangi beban fiskal pada kelompok miskin. (Rahman & Alamsyah, 2019)

Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Indonesia

Namun, hasil analisis regresi menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah memiliki koefisien sebesar 0,041237 dan nilai probabilitas 0,0076, yang lebih kecil dari

tingkat signifikansi α (5%). Hal ini menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia 2001-2024. Dengan probabilitas 0,0076 yang signifikan, hubungan ini dapat dipahami dalam konteks teori Mannan menegaskan bahwa pengeluaran pemerintah tidak boleh hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus mempertimbangkan dimensi moral dan spiritual agar selaras dengan nilai-nilai *maqāṣid syariah*. Pengeluaran negara juga perlu diarahkan untuk mengurangi kesenjangan sosial, menanggulangi kemiskinan, dan menciptakan distribusi kekayaan yang lebih merata melalui kebijakan fiskal yang adil serta bebas dari unsur riba. Penelitian yang dilakukan oleh Erliza Millenia Putri dan Dewi Zaini Putri menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap kemiskinan, memberikan perspektif bahwa peningkatan belanja negara tidak selalu menurunkan kemiskinan jika tidak fokus pada program sosial yang efektif. (Wahyuni, 2021)

Pengaruh Zakat terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa zakat memiliki koefisien sebesar -0,021258 dan nilai probabilitas 0,1263, yang lebih besar dari tingkat signifikansi α (5%). Hal ini menunjukkan bahwa zakat berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia 2001-2024. Namun, dengan probabilitas 0,1263 yang lebih besar dari 0,05, hubungan ini negatif tidak signifikan secara statistik. Dalam konteks teori M. Nejatullah Siddiqi, fenomena ini dapat diinterpretasikan dengan melihat bahwa pengelolaan dan pendistribusian zakat di Indonesia belum optimal. Masih terdapat masalah seperti fragmentasi lembaga amil zakat, di mana banyak lembaga yang beroperasi secara tidak terkoordinasi, serta alokasi yang tidak tepat sasaran, membuat dana zakat sering kali tidak tepat menjangkau mereka yang paling membutuhkan. Penelitian yang dilakukan oleh An Nisa'u Raihan. menunjukkan bahwa berpengaruh negatif tidak signifikan yang dimana efektivitas zakat dalam menanggulangi kemiskinan tergantung pada manajemen dan distribusi yang baik, memberikan perspektif bahwa rendahnya signifikansi zakat mungkin disebabkan oleh keterbatasan dalam pengumpulan dan penyaluran dana. (Raihan & K, 2021)

ANALISIS PENGARUH REALISASI PENDAPATAN NEGARA, PENGELUARAN PEMERINTAH, DAN ZAKAT TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI INDONESIA DITINJAU DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (2001-2024)

Pengaruh Pendapatan Negara, Pengeluaran Pemerintah, Dan Zakat Terhadap Tingkat Kemiskinan Secara Simultan Di Indonesia

Hasil analisis uji F-statistik menunjukkan bahwa pendapatan negara, pengeluaran pemerintah, dan zakat secara simultan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan, dengan nilai F-statistik sebesar 144,8081 dan probabilitas 0,000000, yang lebih kecil dari tingkat signifikansi α (5%). Hal ini menolak hipotesis nol (H_0) dan mengindikasikan bahwa secara kolektif, variabel-variabel independen memiliki hubungan yang signifikan terhadap variabel dependen. Model regresi memiliki nilai Adjusted R-squared sebesar 0,949387, yang berarti variabel-variabel independen mampu menjelaskan 94,94% dari variasi tingkat kemiskinan, sedangkan 5,06% dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mohammad Soleh dan Nunung Wahyuni, yang menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah dan dana zakat berperan dalam mengurangi kemiskinan, hasil ini mengkonfirmasi bahwa kombinasi kebijakan fiskal dan instrumen Islam dapat efektif dalam mengatasi kemiskinan struktural. Jika pendapatan negara meningkat melalui pajak yang adil, pengeluaran pemerintah dapat dialokasikan untuk redistribusi aset dan akses layanan publik, sementara zakat mendukung solidaritas sosial.(Yusuf, 2022)

Pengaruh Pendapatan Negara, Pengeluaran Pemerintah, Zakat, Dan Tingkat Kemiskinan Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Pendapatan negara, pengeluaran pemerintah, zakat, dan tingkat kemiskinan dalam pandangan ekonomi Islam secara fundamental, mengedepankan prinsip keadilan, keseimbangan, dan menghindari eksploitasi. Dalam konteks ini, pendapatan negara harus diperoleh secara halal dan digunakan untuk kesejahteraan umat, pengeluaran pemerintah harus berorientasi pada masalah (kemaslahatan), zakat sebagai instrumen redistribusi untuk mengurangi kemiskinan, dan kemiskinan sebagai masalah yang harus diatasi melalui solidaritas sosial, Teori ekonomi Islam menurut M. Umer Chapra pentingnya pengelolaan pendapatan negara dan pengeluaran pemerintah yang berlandaskan prinsip keadilan dan kesejahteraan sosial. Chapra berargumen bahwa pengelolaan sumber daya negara harus dilakukan dengan cara yang tidak hanya efektif dalam mencapai tujuan ekonomi, tetapi juga mendukung kesejahteraan umat. Dalam praktiknya, ekonomi Islam

menawarkan alternatif pengelolaan yang lebih sesuai dengan prinsip syariah, seperti baitul mal untuk pengelolaan pendapatan negara dan zakat, pengeluaran pemerintah yang fokus pada program sosial tanpa riba, serta zakat produktif melalui modal usaha bagi mustahik. Secara keseluruhan, hubungan antara pendapatan negara, pengeluaran pemerintah, zakat, dan kemiskinan dalam perspektif ekonomi Islam menuntut pendekatan yang lebih holistik dan berkelanjutan. (Raihan & K, 2021).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis disimpulkan bahwa Hasil penelitian menunjukkan bahwa realisasi pendapatan negara berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Pengeluaran pemerintah juga terbukti berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kemiskinan. M. Abdul Mannan Peningkatan pengeluaran untuk program sosial dan infrastruktur dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan. Namun, efektivitas pengeluaran pemerintah sangat bergantung pada alokasi yang tepat dan pengelolaan yang baik. Zakat memiliki pengaruh yang negatif tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan, fenomena ini dapat diinterpretasikan. Melihat kondisi pengelolaan dan pendistribusian zakat potensi zakat sebagai instrumen pengentasan kemiskinan tidak dapat dimaksimalkan secara optimal di Indonesia.

Secara simultan, realisasi pendapatan negara, pengeluaran pemerintah, dan zakat memiliki pengaruh positif signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Ini menunjukkan bahwa ketiga variabel tersebut saling berinteraksi dalam mempengaruhi tingkat kemiskinan. Dalam perspektif ekonomi Islam, Secara keseluruhan, hubungan antara pendapatan negara, pengeluaran pemerintah, zakat, dan kemiskinan Islam menekankan pentingnya pengelolaan pendapatan negara dan pengeluaran pemerintah yang berlandaskan prinsip keadilan serta kesejahteraan sosial. Chapra berargumen bahwa pengelolaan sumber daya negara harus dilakukan secara efektif untuk mencapai tujuan ekonomi, sekaligus selaras dengan maqāsid syariah, yang menegaskan bahwa setiap aktivitas ekonomi harus melindungi lima aspek pokok, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Saran

ANALISIS PENGARUH REALISASI PENDAPATAN NEGARA, PENGELUARAN PEMERINTAH, DAN ZAKAT TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI INDONESIA DITINJAU DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (2001-2024)

Berdasarkan temuan penelitian, terdapat beberapa implikasi kebijakan yang dapat dipertimbangkan. pertama untuk negara, negara perlu mengembangkan kebijakan yang lebih efektif dalam pengelolaan pendapatan negara dan pengeluaran pemerintah, dengan fokus pada program-program yang langsung berdampak pada pengentasan kemiskinan. Penting untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat, serta memperkuat kerjasama antara lembaga-lembaga pengelola zakat untuk memastikan distribusi yang adil dan tepat sasaran. Dan untuk peneliti Selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai faktor-faktor lain yang mempengaruhi tingkat kemiskinan, serta dampak dari kebijakan fiskal dan pengelolaan zakat dalam konteks ekonomi Islam. Peningkatan pendidikan dan kesadaran di kalangan masyarakat mengenai pentingnya zakat dan pengelolaan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengentasan kemiskinan.

DAFTAR REFERENSI

- Akhmad, H., & Barabasi, A. (2025). *Analisis Ketimpangan Pendapatan di Indonesia Periode 2017- 2023 (Studi kasus 34 Provinsi di Indonesia)*. 3(1).
- Jufri Jacob, Mohammad Kotib, Muhammad Kamal, Ramli Semmawi, & Fahmi Syam. (2024). Peran Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 5(4), 2961–2970. <https://doi.org/10.47467/elmal.v5i4.1810>
- Khilmia, A., & Rahmawati, L. (n.d.). *Distribusi Pendapatan Perspektif M . Abdul Mannan dan Realisasinya di Indonesia*. <https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v9i1.5665>
- Mannan, M. A. (2022). *Production Theory Analysis of Islamic Economic Perspective in the Book of Islamic Economics Theory and Practice by Muhammad Abdul Mannan Analisis Teori Produksi Perspektif Ekonomi Islam dalam Buku Islamic Economics Theory And Practice Karya*. 2(1).
- Murteza, Y. H., & Aziz, J. A. (2024). *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi , Keuangan & Bisnis Syariah Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi , Keuangan & Bisnis Syariah*. 6, 3834–3847. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i5.1286>

- Ningsih, S., & Dukalang, H. H. (2019). Penerapan Metode Suksesif Interval pada Analisis Regresi Linier Berganda. *Jambura Journal of Mathematics*, 1(1), 43–53. <https://doi.org/10.34312/jjom.v1i1.1742>
- Padilah, T. N., & Adam, R. I. (2019). Analisis Regresi Linier Berganda Dalam Estimasi Produktivitas Tanaman Padi Di Kabupaten Karawang. *FIBONACCI: Jurnal Pendidikan Matematika Dan Matematika*, 5(2), 117. <https://doi.org/10.24853/fbc.5.2.117-128>
- Putri, E. M., & Putri, D. Z. (2021). Pengaruh Upah Minimum, Tingkat Pengangguran Terbuka, Pendidikan Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Kemiskinan di Indonesia. *Ecosains: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Pembangunan*, 10(2), 106. <https://doi.org/10.24036/ecosains.11564057.00>
- Rahman, A., & Alamsyah, M. F. (2019). Pengaruh Pendidikan, Pendapatan dan Konsumsi Terhadap Kemiskinan Masyarakat Migran Di Kota Makassar. *EcceS (Economics, Social, and Development Studies)*, 6(1), 111. <https://doi.org/10.24252/ecc.v6i1.9546>
- Raihan, M., & K, K. (2021). Efektivitas Pemanfaatan Zakat Produktif oleh Mustahik di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara pada Masa Pandemi Covid-19. *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)*, 3(1), 13–28. <https://doi.org/10.15642/mzw.2021.3.1.13-28>
- Syakur, A., & Kholik, J. A. (2019). *Optimalisasi Peran Zakat Dalam Ekonomi*. 1.
- Wahyuni, M. S. & N. (2021). Pengaruh IPM , PDRB dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap. *Ijieb*, 6(2), 86–106.
- Yusuf, S. D. (2022). *PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM M. UMAR CHAPRA*. 3(April), 65–79.